

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Sukma Rahmawaty^{1*}, Muhlis Madani², Haerana³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The research objective was to determine the implementation of the School Operational Assistance Fund policy at SD INP Bambamanurung based on Edward III's theory. The type of research used is a descriptive type with a qualitative approach. The results of the study show that of the four indicators, the steps taken by the Government in managing BOS funds have been going well, seen from communication that conveys information directly, adequate human resources, disposition and bureaucratic structure that are in accordance with established standards. , but there are still some deficiencies due to inhibiting factors in the form of a lack of adequate facilities obtained by traders and the community as those who are affected by this policy.

Keywords: *Bos Fund, Implementation, Policy, Government*

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD INP Bambamanurung berdasarkan teori Edward III. Tipe penelitian yang di gunakan adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keempat indikator tersebut, langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah dalam mengelola dana BOS sudah berjalan secara baik dilihat dari komunikasi yang menyampaikan informasi secara langsung, sumber daya manusia yang memadai, disposisi dan struktur birokrasi yang sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kekurangan karena adanya faktor penghambat berupa kurangnya fasilitas yang memadai yang didapatkan oleh para pedagang dan masyarakat selaku yang terdampak pada kebijakan ini.

Kata kunci: Dana Bos, Implementasi, Kebijakan, Pemerintah

* sukma@gmail.com

PENDAHULUAN

Di Indonesia, untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan telah di atur dalam UUD 1945, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. PP No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berisikan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 - 5 tahun diwajibkan mengikuti pendidikan dasar. Dengan penekanan pada wajib belajar sembilan tahun, siswa sekolah dasar dibebaskan dari biaya operasional sekolah. Pihak sekolah secara langsung mengelola biaya operasional sekolah yang meliputi biaya pendaftaran, biaya bulanan, biaya ujian, bahan dan biaya praktek. Biaya tersebut belum termasuk investasi seperti pembelian gedung dan prasarana sekolah, gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta biaya terkait peningkatan kualitas guru. Selain itu, dengan menerima dana BOS diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran.

Pada tahun 2005 seluruh anak sekolah di Indonesia menerima bantuan dana Sebagai hasil dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari administrasi negara sebagai

pemotongan dari subsidi BBM. Jadi sejak tahun 2005 biaya sekolah dibebaskan, SPP (Sumbangan Pengembangan Pendidikan) dan BP3 (Badan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan) yang dikelola oleh Komite Sekolah Oleh karena itu, setiap orang berhak menerima ketersediaan pendidikan, sehingga pendidikan benar-benar harus tepat sasaran menghasilkan orang-orang yang baik dan kompetitif, juga memiliki karakter dan moral yang baik, tumbuhlah tetap peduli terhadap ketersediaan dan mutu pendidikan bagi masyarakat dari upaya pemerintah untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dapat membangun dan memajukan bangsa dan negara untuk mencapai hal tersebut pengetahuan, kecerdasan dan karakter masyarakat dan pelatihan merupaka investasi yang signifikan dalam implementasi keberlanjutan.

Salah satu indikator penyelesaian program wajib belajar 9 tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. pada tahun 2005 APK SD mencapai 115% sedangkan SMP pada 2009 tercapai 98,11%, sehingga wajib belajar 9 tahun selesai dalam waktu 7 tahun sebelumnya Education for All (EFA) di Dakar (Permendikbud, 2012).

Program Bantuan Operasional Sekolah dengan tujuan khusus untuk pembebasan biaya dan BOS memastikan siswa miskin tidak putus sekolah karena alasan keuangan, karena dia tidak mampu membeli seragam/dokumen dan pengeluaran lainnya.

Program BOS yang diluncurkan pada bulan Juli 2005 ini memiliki peran tersendiri dalam mempercepat pencapaian wajib belajar 9 tahun. Karena itu, sejak 2009, pemerintah melakukan perubahan Tujuan dari pendekatan dan orientasi program BOS adalah untuk memperluas akses perbaikan mutu. Mekanisme dana BOS telah berubah Distribusi transfer ke kabupaten/kota 2011 ke transfer provinsi dan kemudian ditransfer secara online ke rekening sekolah tahun 2012. Dana BOS dari rekening Satker Propinsi akan dikirim ke rekening sekolah penerima sesuai BOS. Berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dan penyalur tersebut.

Dana BOS merupakan program pemerintah yang dibuat melalui redistribusi Subsidi BBM di sektor pendidikan. Tujuan dari program ini adalah gratis biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan

membantu siswa lain, dan dana BOS dikelola langsung oleh sekolah karena dana BOS ditransfer ke sekolah-sekolah oleh Dinas Pendidikan kabupaten melalui internet. Dengan BOS siswa diharapkan menerima pendidikan Kualitas sampai dengan 9 (sembilan) tahun. Target sasaran dari program ini adalah semua siswa Sekolah Dasar dan Menengah, baik negeri maupun swasta, di seluruh provinsi Indonesia (Annisa, 2020).

Terkait dengan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 tentang Syarat Penerimaan Dana BOS Reguler, terdapat beberapa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi sekolah untuk dapat menerima dana BOS Reguler (Permendikbudristek, 2022). Jumlah persyaratan dan kriteria adalah: 1) Memiliki nomor induk sekolah nasional yang tersimpan di Dapodik; 2) Menyelesaikan dan meningkatkan satuan pendidikan Dapodik sesuai dengan kondisi yang sebenarnya paling lambat dari anggaran sebelumnya pada tanggal 31 Agustus 3) Memiliki izin penyelenggaraan pelatihan bagi unit pelatihan yang diselenggarakan oleh badan yang terdaftar di Dapodik 4) Memiliki rekening Satuan Pendidikan atas Nama Satuan Pendidikan 5) Tidak merupakan Satuan Pendidikan

kerjasama 6) Tidak ada bagian dari unit pelatihan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain. Sedangkan unit pelatihan yang diterima Dana Kinerja BOS terdiri dari sekolah mengemudi; dan sekolah lanjutan.

Setelah undang-undang ditetapkan, proses kebijakan berlanjut ke tahap implementasi kebijakan, di mana berbagai individu, organisasi, dan proses bekerja sama untuk melaksanakan arahan kebijakan atau program pemerintah. Implementasi, adalah proses, keluaran, dan hasil fenomena multifaset (Syahrudin, 2019). Implementasi kebijakan ialah strategi dan bentuk pengelolaan berbagai sistem yang berlaku dalam organisasi untuk mencapai tingkat integrasi yang paling tinggi dari dari seluruh yang terlibat (Tjilen, 2019). Pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari sudut atau metode tertentu. Sedangkan Menurut Merilee S. Grindle (1980) "Implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh

apa dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan dari Van Meter Dan Van Horn (1975) yang memiliki enam indikator yaitu 1) standar dan sasarankebijakan, 2) sumber daya 3) karakteristik organisasi pelaksana 4) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana 5) sikap para pelaksana 6) lingkungan Sosial,ekonomi, dan politik (Fauziah & Arif, 2021) Metode masalah implementasi adalah salah satunya, menurut Edward (III, 1984) dengan mengedepankan dua isu utama, yaitu: (i) memasukkan aspek-aspek implementasi yang mendukung kebijakan pendekatan Edwards III menimbulkan masalah implementasi. dan (ii) hambatan implementasi kebijakan menuju keberhasilan berdasarkan dua pertanyaan tersebut, empat fakto wewenang/struktur birokrasi komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Dikembangkan sebagai kebutuhan utama bagi keberhasilan proses implementasi. desain organisasi. Keempat unsur ini merupakan persyaratan penting dalam mempraktekkan suatu kebijakan.

Dalam pelaksanaan kebijakan dana BOS di SDN Inpres Bambamanurung, keterbatasan pemahaman staf dalam mengelola dana

menyebabkan keterlambatan pembayaran karena kekurangan tenaga pengajar, sehingga banyak guru yang juga berperan sebagai bendahara sekolah dan pihak sekolah. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana SDN INP Bambamanurung telah melaksanakan pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan BOS dengan mengacu pada PP No 57 Tahun 2021 Standar Nasional Pendidikan.

Setiap sekolah umumnya menerapkan kebijakan masing-masing dalam mengelola dana BOS yang diterima dari Dinas Pendidikan Sampang. Karena perbedaan kebijakan tersebut, sekolah saling mempengaruhi untuk memperbaiki proses pendidikan. Pada umumnya dana BOS yang diterima sekolah dikelola dan digunakan untuk peningkatan pendidikan, yang dijabarkan dalam petunjuk teknis dengan bidang peruntukannya. Tetapi terdapat beberapa identifikasi masalah yang kerap terjadi akibat terkait Implementasi dana Bantuan Operasional Sekolah yaitu: 1) Minimnya dana BOS yang diberikan pemerintah sehingga tidak mampu mencukupi kegiatan operasional sekolah 2) Penggunaan dana BOS belum sepenuhnya dipergunakan untuk

kebutuhan siswa 3) Terjadinya Penyimpangan dana BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah 4) Pelaporan penggunaan dana BOS yang kurang transparan terhadap warga sekolah 5) Penggunaan dana belum digunakan secara efektif dan efisien berdasarkan petunjuk dan teknis penggunaan dana BOS.

METODE

Waktu dan penelitian yang di butuhkan dalam penelitian ini kurang lebih selama 1 bulan lamanya terhitung dari tanggal 21 Juni 2023 sampai 15 Juli 2023. Adapun lokasi penelitian bertempat di SD INP Bambamanurung. SD INP Bambamanurung dipilih menjadi lokasi penelitian karena SD INP Bambamanurung merupakan salah satu instansi yang ikut berpartisipasi menerima Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar di SD INP Bamabamanurung. Faktor pendukung dan penghambat

implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar SD INP Bambamanurung.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi karena melakukan pengumpulan data dengan melalui wawancara disertai dengan data secara tertulis di SD INP Bambamanurung. Agar tujuan dari peneliti bisa akurat sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan dengan dokumen-dokumen, kemudian dilakukan observasi untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya atau kejadian secara nyata yang terjadi dilapangan.

Tujuan yang hendak dicapai dari hasil penelitian ini, yaitu untuk menjelaskan implementasi dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Inpres Bambamanurung efektif dan efisienkah berdasarkan petunjuk dan teknis dan aspek pada komponen penggunaan, mekanisme penyaluran, dan keterlibatan stakeholder dalam perencanaan penyusunan, dan pelaporan dana BOS.

Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yaitu melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi dan data sekunder

yang diperoleh melalui dari data yang sudah ada, dari proses studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, referensi, dokumen yang diperoleh dari lokasipenelitian. Sedangkan untuk pengabsahan data digunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menggunakan teori Edward III tentang Implementasi kebijakan ada 4 variabel yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Sesuai dengan fokus masalah yang menjadi tolak ukur bagi peneliti dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah mengelola pedagang kaki lima di pasar Mandai sebagai berikut:

Komunikasi

Ilmu komunikasi pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan tentang peristiwa komunikasi yang diperoleh melalui suatu penelitian tentang sistem, proses, dan pengaruhnya yang dilakukan secara rasional dan sistematis, serta kebenarannya dapat diuji dan digeneralisasikan (Sendjaja, 2019). Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat

menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan. Dimensi komunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: transmisi, konsistensi, dan kejelasan (Winarno, 2012) Pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik mensyaratkan pelaksana untuk mengetahui yang harus dilakukan secara jelas; tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan.

Keterampilan komunikasi diselaraskan sehingga mereka yang melakukan kegiatan dapat saling bernegosiasi dan menemukan titik-titik kesepahaman/kesepakatan yang saling menguntungkan. Konsensus yang dihasilkan dapat meningkatkan kinerja pribadi di tempat kerja dengan menemukan kondisi win-win solution untuk setiap masalah.

Faktor komunikasi termasuk transmisi (kebijakan tentang sekolah gratis ditransmisikan melalui dana BOS oleh Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah), kejelasan (tujuan sekolah gratis dijelaskan melalui dana BOS), dan konsekuensi dan kekonsistenan.

Dalam hal komunikasi yang dipengaruhi oleh kebijakan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bisa dijelaskan jika pelaksanaan Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD INP Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sudah mengikuti petunjuk teknis BOS dan berjalan dengan cukup baik, terdapat sosialisasi dari dinas terkait ke sekolah, serta adanya petunjuk Teknis BOS yang diberikan kepada sekolah, adanya sosialisasi Bintek pengelolaan BOS yang diikuti secara rutin, dan penggunaan dana yang sepenuhnya untuk kepentingan sekolah.

Sumber Daya

Implementasi kebijakan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya (orang, bahan dan metode). Penegakan kebijakan publik harus menyeluruh, jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana tidak memiliki sumber daya untuk melakukannya, kebijakan biasanya tidak ditegakkan secara efektif. Tanpa dukungan sumber daya, kebijakan hanyalah dokumen yang belum diimplementasikan untuk memberikan solusi atas masalah masyarakat yang ada atau upaya penyampaian layanan masyarakat. Oleh

karena itu, sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Langkah-langkah implementasi kebijakan publik meliputi: sumber daya manusia, informasi, dana, keterampilan, dan alat pendukung lainnya yang memadai (Afandi & Warjio, 2015).

Karyawan di SD INP Bambamanurung yang memperoleh SK memiliki pengalaman dalam pengelolaan sekolah. Berdasarkan pengamatan peneliti dapat disimpulkan bahwa karyawan yang diberi tugas sebagai pengelola BOS adalah guru yang juga diberi tugas sebagai pengelola BOS. Akibatnya, mereka belum sepenuhnya memiliki pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola administrasi dan keuangan

Dari beberapa hasil analisa peneliti terhadap beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal sumber daya yang terpengaruhi oleh kebijakan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Petugas yang mengelola BOS sudah berdasarkan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh sekolah ditandaangani oleh kepala sekolah; b) SD INP Bambamanurung sudah memiliki tenaga pendidik dan

kependidikan yang memadai sesuai dengan jumlah siswa yang dimiliki; c) SK petugas pengelola BOS sudah berdasarkan struktur yang ada di Juknis BOS; d) Pelaksanaan program BOS sudah diawasi oleh para pengawas baik dari tingkat pusat, provinsi maupun oleh kabupaten/kota; e) SD INP Bambamanurung memiliki petugas yang memperoleh SK pengelola BOS tetapi tidak memiliki pengalaman dalam bidang pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah, karena semua pengelola adalah guru yang diberi tugas tambahan dengan latar belakang akademik sebagai pendidik f) Insentif sudah diberikan kepada semua pengelola BOS sesuai dengan Juknis BOS berupa transport dan uang lelah; g) Penyerahan dana BOS sudah sesuai dengan pedoman BOS terbaru, tetapi terkadang sering terjadi ketidak tepatan dalam jadwal pencairan dana BOS; h) Semua petugas pengelola BOS sudah mengetahui apa yang wewenang dan tanggung jawabnya dengan jelas.

Dalam hal sumber daya yang dipengaruhi oleh kebijakan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bisa dijelaskan jika semua petugas yang bertugas mengelola BOS sudah berdasarkan surat keputusan (SK) yang telah

dikeluarkan oleh sekolah dan di tanda tangani langsung oleh Kepala Sekolah, kemudian SD INP Bamabamanurung sendiri telah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah memadai sesuai dengan jumlah siswa yang mereka miliki, semua SK petugas Pengelola BOS telah sesuai dengan standar struktur yang terdapat di Juknis BOS, pelaksanaa BOS di SD INP Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah telah diawasi oleh para pengawas baik dari tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Tetapi petugas yang menerima SK Pengelola BOS adalah mereka yang tidak memiliki pengalaman dalam bidang pengelolaan administrasi keuangan, karena pengelola BOS adalah guru yang telah diberi tugas tambahan yang memiliki latar belakang pendidik.

Disposisi

Sifat pelaksana kebijakan, seperti Komitmen, disiplin, jujur, cerdas dan berkarakter demokratis. Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari

kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan dukungan atau hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan tergantung dari kesesuaian kompetensi dan sikap dari pelaksanaan. Karena itu, pemilihan dan penetapan personalia pelaksana kebijakan dipersyaratkan individu-individu yang memiliki kompetensi dan dedikasi yang tepat pada kebijakan yang telah ditetapkan (Afandi & Warjio, 2015).

Dalam hal disposisi yang dipengaruhi oleh kebijakan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sekolah telah berkomitmen meyalurkan dana BOS untuk mendukung program sekolah gratis sesuai dengan pedoman. Pengelola BOS telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, program BOS mendapat dukungan dari masyarakat, dan kegiatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sekolah gratis dilakukan melalui dana BOS telah diikuti secara rutin.

Struktur Birokrasi

Kewenangan adalah wewenang/legitimasi pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang

ditentukan secara politis (Afandi & Warjio, 2015). Kewenangan ini mengacu pada struktur birokrasi yang terkait dengan tugas/strategi kelembagaan atau individu pelaksana kebijakan. Ciri utama birokrasi biasanya tertuang dalam metode kerja atau standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi organisasi.

SD INP Bambamanurung memiliki dokumen pelaporan penggunaan BOS yang dikirim ke berbagai pihak terkait. Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi yang terpengaruhi oleh kebijakan didasarkan pada temuan wawancara yang telah dilakukan sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut: a) SD INP Bambamanurung sudah memiliki penanggung jawab pelaksanaan kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS b) SD INP Bambamanurung Sudah ada mekanisme penyaluran dana BOS untuk sekolah gratis sesuai dengan Juknis BOS c) SD INP Bambamanurung sudah memiliki pedoman dalam pelaksanaan program BOS sesuai dengan Juknis BOS d) SD INP Bambamanurung memiliki dokumen pelaporan penggunaan BOS ke berbagai pihak terkait

Dalam hal struktur birokrasi yang terpengaruhi oleh kebijakan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa semua sekolah tiap jenjang sudah memiliki penanggung jawab pelaksanaan kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS, sudah ada mekanisme penyaluran dana BOS untuk sekolah gratis sesuai dengan Juknis BOS, sudah ada pedoman dalam pelaksanaan program BOS sesuai dengan Juknis BOS dan semua sekolah memiliki dokumen pelaporan penggunaan BOS ke berbagai pihak baik triwulan maupun tahunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan “Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD INP Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah” maka dari itu, peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian yaitu: a) Dalam hal komunikasi yang dipengaruhi oleh kebijakan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bisa dijelaskan jika pelaksanaan Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD INP Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah

sudah mengikuti petunjuk teknis BOS dan berjalan dengan cukup baik. b) Sumber Daya dalam hal ini adalah ketersediaan petugas yang mengelola BOS sesuai petunjuk Juknis c) Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan baik dan cukup konsisten dalam meyalurkan dana BOS sesuai yang tertulis di Juknis d) Struktur Birokrasi terdapat dalam mekanisme penyaluran dana BOS untuk sekolah gratis sesuai dengan Juknis BOS, sudah ada pedoman dalam pelaksanaan program BOS sesuai dengan Juknis BOS dan semua sekolah memiliki dokumen pelaporan penggunaan BOS ke berbagai pihak baik triwulan maupun tahunan.

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan dilapangan, maka penyimpulan akhir tentang Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD INP Bambamanurung secara umum sudah berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknik Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Semua petugas pelaksana BOS sudah memiliki SK sesuai dengan peraturan yang ditanda tangani oleh kepala sekolah dan dana yang dialokasikanpun sudah sesuai dengan petunjuk aturan. Meski terkadang terhambat oleh pencairan dana BOS yang tidak tepat

waktu, penggunaan Dana BOS terkadang tidak sesuai dengan rencana kegiatan dan skala prioritas kebutuhan sekolah dengan adanya instrument biaya yang tidak terduga yang harus dibeli sekolah yang ditentukan oleh dinas terkait.

REFERENSI

- Afandi, M., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Administrasi Publik*, 6(2), pp. 92–113.
- Annisa, N. (2020). *Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar (studi Kabupaten Kampar)* (Skripsi, UIN Suska Riau, Riau).
- Fauziah, W. E., & Arif, L. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horin Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) di Kabupaten Tuban. *Pembangunan*, 4 No 2, p. 677.
- Grindle, M. S. (1980). *Politic and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Permendikbud. (2012). *Permendikbud No 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Aanggran 2013*.
- Permendikbudristek. (2022). *Tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional*

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini , Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasi.

- Sendjaja, S. D. (2014). Memahami Teori Komunikasi: Pendekatan, Pengertian, Kerangka Analisis, dan Perspektif. *Univeritas Terbuka: Modul Kegiatan Pembelajaran.*
- Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik* (2nd ed.). Nusa Media.
- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori, dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik.* Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus.* Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.